



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendorong Perangkat Daerah lebih selektif dalam merencanakan program kegiatan dan keuangan, serta kegiatan pemerintahan yang efisiensi, efektivitas, ekonomis dan akuntabilitas diperlukan standar belanja setiap kegiatan yang direncanakan oleh Perangkat Daerah;
- b. bahwa mengacu ketentuan dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar belanja ditetapkan dengan perkada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 21 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Gresik.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah TAPD Kabupaten Gresik.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah perencanaan dan penganggaran yang berisi program kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Gresik.
8. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
9. Pengguna Barang adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan barang Milik Daerah.
10. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai Pengurang nilai kekayaan bersih.

11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu satuan kerja dalam satu tahun anggaran.
15. Deskripsi Kegiatan adalah pengertian, penjelasan dan batasan dari kelompok/group kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama. Persamaan perhitungan total belanja kegiatan merupakan metode yang digunakan untuk menghitung total belanja dari kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kelompok/group kegiatan yang mempunyai karakteristik.
16. Batasan alokasi rincian obyek belanja adalah rincian obyek belanja yang diperkenankan untuk dianggarkan pada RKA Perangkat Daerah, untuk tiap kelompok/group kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
17. Pengendali Belanja adalah faktor-faktor yang memicu biaya/belanja dari suatu kegiatan yang dilakukan.
18. Satuan Pengendali Belanja tetap adalah belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan suatu kegiatan.

BAB II

RUANG LINGKUP, MANFAAT DAN TUJUAN ASB

Pasal 2

- (1) ASB dalam Peraturan Bupati ini hanya menentukan standar dalam penilaian kewajaran belanja atas anggaran yang diajukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan suatu kegiatan.

- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengatur standar dalam penilaian kewajaran beban kerja terhadap suatu kegiatan yang dianggarkan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan sebagai berikut:
 - a. standar untuk mengevaluasi kewajaran biaya dan menentukan tingkat efisiensi dan ekonomi dari Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang diusulkan;
 - b. standar Penyusunan Plafon Anggaran Perangkat daerah; dan
 - c. standar pada fungsi penyusunan anggaran (Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah).
- (2) Standar Penyusunan Plafon Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maka fungsi perencanaan Pemerintah Daerah dapat menggunakan ASB sebagai salah satu cara untuk memperkirakan jumlah rupiah plafon untuk tiap kegiatan yang tercantum pada Dokumen RKPD, KUA dan PPAS.
- (3) Standar pada fungsi Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka Dokumen ASB berguna sebagai pedoman dalam menyusun anggaran sehingga Perangkat Daerah mempunyai kepastian dan aturan berkaitan dengan jenis belanja dan jumlah (besaran) rupiah yang diperkenankan untuk tiap-tiap kegiatan.

Pasal 4

Penerapan ASB bertujuan untuk:

- a. menentukan kewajaran belanja suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas;
- c. mendorong terciptanya kegiatan pemerintah yang efisien, efektif, ekonomis dan akuntabel; dan

- d. pengendalian anggaran dalam rangka menjamin anggaran yang ditetapkan merupakan anggaran yang efisien dan ekonomis.

BAB III MUATAN ASB

Pasal 5

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari komponen yang meliputi:

- a. Deskripsi Kegiatan;
- b. Pengendali Belanja;
- c. Satuan Pengendali Belanja Tetap;
- d. Satuan Pengendali Belanja Variabel;
- e. Persamaan Rumus Penghitungan Total Belanja; dan
- f. Batasan Alokasi Objek Belanja.

Pasal 6

- (1) Deskripsi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan pengertian, penjelasan detail operasional peruntukan dan batasan dari kelompok/group kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Deskripsi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemberian nama kegiatan yang dianggarkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah harus sesuai dengan batasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.

Pasal 8

- (1) Satuan Pengendali Belanja Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja suatu kegiatan berubah-ubah.

- (2) Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.
- (3) Besarnya nilai belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan.

Pasal 9

Satuan Pengendali Belanja Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan besarnya perubahan belanja untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan.

Pasal 10

- (1) Persamaan Rumus Penghitungan Total Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan yang termasuk dalam kelompok/group kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Jumlah total belanja yang dianggarkan untuk kegiatan yang termasuk dalam kelompok/group kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama tidak boleh melebihi dari total belanja yang dihasilkan dari persamaan perhitungan total belanja kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b;
- (3) Contoh penggunaan persamaan rumus perhitungan total belanja kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat e sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Batasan Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan proporsi rincian objek belanja dari suatu kegiatan yang diperkenankan untuk dianggarkan pada Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, untuk tiap kelompok/group kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.

- (2) Proporsi rincian obyek belanja yang diperkenankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prosentase rata-rata, batas bawah dan batas atas jumlah rupiah dari total belanja yang diperbolehkan untuk dianggarkan untuk tiap rincian belanja dari tiap kegiatan.
- (3) Batasan alokasi rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta prosentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Rincian obyek tiap kegiatan yang dianggarkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah tidak boleh diluar dari rincian obyek belanja yang tercantum pada batasan alokasi rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Perangkat Daerah dapat menganggarkan rekening belanja diluar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah sebagai Ketua TAPD.
- (6) Perangkat Daerah dapat menganggarkan melebihi prosentase jumlah rupiah yang diperkenankan untuk tiap rincian obyek, dengan syarat prosentase jumlah obyek belanja dan induk dari rincian obyek belanja tidak melebihi dari prosentase yang telah ditetapkan pada Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Perangkat Daerah dapat menganggarkan melebihi prosentase jumlah rupiah yang diperkenankan untuk tiap rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan prosentase jumlah rupiah melebihi dari prosentase yang telah ditetapkan pada Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah sebagai Ketua TAPD.

BAB IV
JENIS ASB
Pasal 12

- (1) Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. ASB 001 - Sosialisasi Tatap Muka Pegawai-Paruh Waktu;
 - b. ASB 002 - Sosialisasi Tatap Muka Pegawai-Penuh Waktu;
 - c. ASB 003 - Sosialisasi Tatap Muka Masyarakat Dengan Melibatkan Narasumber Eksternal;
 - d. ASB 004 - Sosialisasi Tatap Muka Masyarakat Dengan Melibatkan Narasumber Internal;
 - e. ASB 005 - Penyuluhan;
 - f. ASB 006 - Pelatihan Pegawai Tanpa Praktik Lapangan di Dalam Kantor-Paruh Waktu;
 - g. ASB 007 - Pelatihan Pegawai Tanpa Praktik Lapangan di Dalam Kantor-Penuh Waktu;
 - h. ASB 008 - Pelatihan Pegawai Tanpa Praktik Lapangan di Luar Kantor-Penuh Waktu;
 - i. ASB 009 - Pelatihan Pegawai Tanpa Praktik Lapangan di Luar Daerah-Penuh Waktu;
 - j. ASB 010 - Pelatihan Non-Pegawai Tanpa Praktik Lapangan di Dalam Kantor-Paruh Waktu;
 - k. ASB 011 - Pelatihan Non-Pegawai Tanpa Praktik Lapangan di Dalam Kantor-Penuh Waktu;
 - l. ASB 012 - Pelatihan Non-Pegawai Dengan Praktik Lapangan di Dalam Kantor-Paruh Waktu;
 - m. ASB 013 - Pelatihan Non-Pegawai Tanpa Praktik Lapangan di Luar Kantor-Penuh Waktu;
 - n. ASB 014 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - o. ASB 015 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - p. ASB 016 - Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - q. ASB 017 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan;

- r. ASB 018 - Administrasi Kajian/Penelitian Pihak Ketiga; dan
 - s. ASB 019 - Administrasi Mengikuti Pameran.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENERAPAN ASB

Pasal 13

- (1) Setiap Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kegiatan yang telah ada standar belanja harus mengacu pada ASB.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan satu ASB.
- (3) Apabila kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD terdiri dari gabungan beberapa kegiatan yang diatur dalam standar belanja dan bukan merupakan satu kesatuan proses, dapat menggunakan lebih dari satu ASB setelah dilakukan pencermatan oleh TAPD.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Dalam hal kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah belum dapat disetarakan dalam Analisis Standar Belanja, Kepala Perangkat Daerah mengusulkan besaran belanja kegiatan berdasarkan Rencana Anggaran Belanja dengan prinsip efisien, efektif, dan akuntabel.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah Rencana Anggaran Belanja dicermati kesesuaian rincian belanja dengan Standar Harga Barang dan Jasa oleh TAPD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Gresik Nomor 36 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 36 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 7 Oktober 2021

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 7 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

ttd

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., MT.
Pembina Tingkat I
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 NOMOR 28

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GRESIK
 NOMOR 28 TAHUN 2021
 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN 2022

A. ASB-001 SOSIALISASI TATAP MUKA PEGAWAI – PARUH WAKTU

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk memperkenalkan program/produk/peraturan/lainnya kepada pegawai Pemerintah Kabupaten Gresik melalui kegiatan tatap muka secara langsung. Aktivitas ini diselenggarakan di lingkungan kantor Kabupaten Gresik dengan durasi pelaksanaan maksimal 4 jam.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp47.482,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

= Rp47.482,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan

Tabel 001. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Pagu (Rp)
1	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	32,03%	15.210
2	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	67,97%	32.272
			100,00%	47.482
3	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia*		

*Dianggarkan sesuai dengan kualifikasi Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia.

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Belanja Perjalanan Dinas Biasa; dan
2. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	776 peserta	25 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	18 hari/kali	1 hari/kali

Contoh Aktivitas ASB 001:

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
1	Kecamatan Balongpanggang	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Sosialisasi
2	Badan Kepegawaian Daerah	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Sosialisasi Jabatan Fungsional Lainnya
3	Badan Kepegawaian Daerah	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Sosialisasi Jabatan Fungsional Satpol PP
4	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Sosialisasi
6	Dinas Pendidikan	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Sosialisasi

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
7	Dinas Pendidikan	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Sosialisasi
8	Kecamatan Kebomas	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sosialisasi Arsitektur Aplikasi
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Sosialisasi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Sosialisasi Arsitektur Data dan Informasi
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Sosialisasi Arsitektur Keamanan Informasi
13	Dinas Pendidikan	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Sosialisasi Asesmen Nasional
14	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Sosialisasi dan Koordinasi Suplemen Gizi
15	Dinas Pendidikan	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Sosialisasi Indeks Inklusi
16	Dinas Pendidikan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Sosialisasi Juknis BOS APBN
17	Dinas Pendidikan	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Sosialisasi ke Kasek SD, SMP Negeri (PPDB)

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
18	Sekretariat Daerah_Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Sosialisasi ketentuan cukai
19	Dinas Pendidikan	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Sosialisasi Kurikulum Muatan Lokal
20	Dinas Pendidikan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Sosialisasi Pembinaan PTK
21	Dinas Pendidikan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Sosialisasi BPPDGS
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Sosialisasi Satu Data
23	Sekretariat Daerah_Bagian Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Sosialisasi Penyampaian Administrasi Dana Hibah Tempat Ibadah dan Lembaga_Keliling ke lokasi
24	Dinas Pertanian	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Sosialisasi Penyusunan Validasi LBS Kab. Gresik

B. ASB-002 SOSIALISASI TATAP MUKA PEGAWAI-PENUH WAKTU

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk memperkenalkan program/produk/peraturan/lainnya kepada pegawai Pemerintah Kabupaten Gresik melalui kegiatan tatap muka secara langsung. Aktivitas ini diselenggarakan di lingkungan kantor Kabupaten Gresik dengan durasi pelaksanaan sosialisasi lebih dari 4 jam.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp90.479,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

= Rp90.479,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan

Tabel 002. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Pagu (Rp)
1	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	33,23%	30.068
2	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	66,77%	60.412
			100,00%	90.479
3	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia*		

*Dianggarkan sesuai dengan kualifikasi Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia.

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer dan Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan; dan
2. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	90 peserta	30 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	2 hari/kali	1 hari/kali

Contoh Aktivitas ASB 002:

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
1	Badan Kepegawaian Daerah	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Sosialisasi Jabatan Fungsional Guru
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Sosialisasi
3	Dinas Pendidikan	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Sosialisasi AKM Kesetaraan
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Sosialisasi Pedoman Monev SPBE
5	Sekretariat Daerah_Bagian Pemerintahan	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Sosialisasi tata cara kerja sama daerah

C. ASB-003 SOSIALISASI TATAP MUKA MASYARAKAT DENGAN MELIBATKAN NARASUMBER EKSTERNAL

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk memperkenalkan program/produk/peraturan/lainnya kepada masyarakat melalui kegiatan tatap muka secara langsung. Aktivitas ini diselenggarakan di lingkungan Kabupaten Gresik dengan melibatkan narasumber yang berasal dari Eksternal Pemerintah Kabupaten Gresik.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp44.137,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

= (Rp44.137,00 x jumlah peserta keseluruhan x jumlah hari pelaksanaan) + (Rp110.000,00 x jumlah peserta masyarakat x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 003. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Pagu (Rp)
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	20,92%	9.234
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8,59%	3.790
3	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	70,49%	31.113
			100%	44.137
4	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia*		
5	5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat**		110.000

* Dianggarkan sesuai dengan kualifikasi Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia.

**Dianggarkan sesuai dengan jumlah masyarakat yang diundang.

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan

1. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia;
2. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat;
3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover;
4. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor;
5. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata;
6. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota; dan
7. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	180 peserta	45 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	10 hari/kali	1 hari/kali

Contoh Aktivitas ASB 003:

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
1	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Sosialisasi Peran Lembaga Masyarakat dalam Penegakan Regulasi dan Pengawasan Penggunaan Anggaran dalam Mewujudkan Pembangunan Yang Responsif Gender
2	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi PATBM Tahap II
3	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi SRA Tahap II

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
4	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Sosialisasi Infeksi Laten Tb Dan Pengobatan Pencegahan Bagi Dokter
5	Dinas Perikanan	Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam satu daerah kab/kota	Sosialisasi Gemarikan
6	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus	Sosialisasi GPMB

D. ASB-004 SOSIALISASI TATAP MUKA MASYARAKAT DENGAN MELIBATKAN NARASUMBER INTERNAL

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk memperkenalkan program/produk/peraturan/lainnya kepada masyarakat melalui kegiatan tatap muka secara langsung. Aktivitas ini diselenggarakan di lingkungan Kabupaten Gresik dengan narasumber yang berasal dari internal Pemerintah Kabupaten Gresik.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp43.638,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

= Rp43.638,00 x jumlah peserta keseluruhan x jumlah hari pelaksanaan) + (Rp110.000,00 x jumlah peserta masyarakat x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 004. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Pagu (Rp)
1	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	19,44%	8.485
2	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	80,56%	35.153
			100,00%	43.638
3	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia*		
4	5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat**		110.000

* Dianggarkan sesuai dengan kualifikasi Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia.

**Dianggarkan sesuai dengan jumlah masyarakat yang diundang.

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan

1. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator Pembawa Acara, dan Panitia;
2. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat;
3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor;
4. Belanja Perjalanan Dinas Biasa; dan
5. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	326 peserta	20 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	8 hari/kali	1 hari/kali

Contoh Aktivitas ASB 004:

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
1	Kecamatan Menganti	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
2	Kecamatan Menganti	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sosialisasi Peraturan Tentang Pelayanan Publik
3	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Sosialisasi Program Bangga Kencana
4	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Program Pemberdayaan Perempuan
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Sosialisasi
6	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Sosialisasi HIV Pada Remaja Usia Sekolah SMP Dan SMA
7	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Sosialisasi Penerapan 5 Pilar STBM Pada Pondok Pesantren
8	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Sosialisasi Penyelenggaraan Pasar Sehat

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
9	Dinas Kesehatan	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Sosialisasi Vaksin Baru
10	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindag	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Sosialisasi Retribusi Dan Kebersihan Pasar
11	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindag	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Sosialisasi/Diseminasi, Publikasi Data Informasi Dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui Siinas
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Sosialisasi PILKADES
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Sosialisasi
14	Dinas Perikanan	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Sosialisasi Pasca Sehat Nelayan
15	Dinas Perikanan	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Sosialisasi Pengelolaan TPI
16	Dinas Perikanan	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Sosialisasi Pra Sehat Nelayan
17	Dinas Perikanan	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Sosialisasi

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pemberdayaan Kapasitas Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Arsip Ormas/Orpol
19	Dinas Pertanian	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Sosialisasi DBHCHT
20	Dinas Pertanian	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Sosialisasi Ketersediaan Pangan
21	Dinas Pertanian	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Sosialisasi Pembinaan Lumbung Pangan
22	Dinas Pertanian	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Sosialisasi Pengelolaan LP2B
23	Dinas Pertanian	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Sosialisasi Penyusunan Peta Pemilik LP2B
24	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru Dan Mekanisme Akses Perumahan KPR- FLPP
25	Satuan Polisi Pamong Praja	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
26	Dinas Sosial	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Sosialisasi LK3
27	Dinas Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja	Sosialisasi
28	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan
29	Kecamatan Balongpanggang	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Sosialisasi
30	Kecamatan Gresik	Fasilitasi Pengelolaan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Sosialisasi
31	Kecamatan Kedamean	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Sosialisasi Bahaya Miras Dan Narkoba
32	Kecamatan Manyar	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Sosialisasi Panitia Pilkades
33	Kecamatan Panceng	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
34	Kecamatan Ujungpangkah	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
35	Kecamatan Wringinanom	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sosialisasi Kebijakan kependudukan
36	Kecamatan Wringinanom	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
37	Kecamatan Wringinanom	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Sosialisasi Pengelolaan Keuangan
38	Sekretariat Daerah Bagian Hukum	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Sosialisasi Peraturan Daerah
39	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Sosialisasi

E. ASB-005 PENYULUHAN

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk memberikan petunjuk teknis yang melibatkan instruktur atau pemandu guna memberikan pengetahuan baik untuk pegawai maupun non pegawai (masyarakat) sehingga menimbulkan terjadinya proses perubahan perilaku dikalangan peserta yakni memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang lebih baik.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp176.595,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

$$= (\text{Rp}176.595,00 \times \text{jumlah peserta keseluruhan} \times \text{jumlah hari pelaksanaan}) + (\text{Rp}110.000,00 \times \text{jumlah peserta masyarakat} \times \text{jumlah hari pelaksanaan})$$

Tabel 005. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Pagu (Rp)
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8,76%	15.473
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10,65%	18.815
3	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21,85%	38.586
4	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24,70%	43.612
5	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	34,04%	60.108
			100,00%	176.595
6	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia*		
7	5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat**		110.000

*Dianggarkan sesuai dengan kualifikasi Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia.

**Dianggarkan sesuai dengan jumlah masyarakat yang diundang

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia;
2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover;
3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer;
4. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas; dan
5. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	240 peserta	35 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	10 hari/kali	1 hari/kali

Contoh Aktivitas ASB-005:

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Kegiatan	Aktivitas
1	Dinas Tenaga Kerja	Peningkatan Pelindungan Kompetensi Pekerja Indonesia (PMI)/Pekerja Indonesia (PMI) dan Calon Migran	Penyuluhan Penempatan Calon PMI ke Luar Negeri
2	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
3	Sekretariat Daerah_Bagian Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	Penyuluhan hukum
4	Dinas Kesehatan	Pengendalian dan Pengawasan Tindakan Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Penyuluhan Keamanan Pangan Jasa Boga/ Rumah Makan/Kantin Sekolah

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Kegiatan	Aktivitas
5	Kecamatan Menganti	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Penyuluhan Pencegahan bahaya Narkoba
6	Kecamatan Ujungpangkah	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Penyuluhan Pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba

F. ASB-006 PELATIHAN PEGAWAI TANPA PRAKTIK LAPANGAN DI DALAM KANTOR – PARUH WAKTU

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kemampuan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam suatu bidang tertentu tanpa memberikan praktik lapangan. Aktivitas ini diselenggarakan di lingkungan kantor Kabupaten Gresik dengan durasi pelaksanaan maksimal 4 jam.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp54.859,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

= Rp54.859,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan

Tabel 006. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Pagu (Rp)
1	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	16,83%	9.230
2	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	51,43%	28.216
3	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31,74%	17.413
			100,00%	54.859
4	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia*		

*Dianggarkan sesuai dengan kualifikasi Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia.

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia; dan
2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	640 peserta	50 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	4 hari/kali	1 hari/kali

Contoh Aktivitas ASB 006:

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
1	Badan Kepegawaian Daerah	Pembinaan Disiplin ASN	Bintek

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
2	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pelatihan Digital Signature
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	BIMTEK
4	Dinas Pendidikan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Bimbingan Teknis Pendataan Bagi Pengawas dan Penilik
5	Dinas Pendidikan	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru GPK
6	Dinas Pendidikan	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Pelatihan Penyusunan Soal Asesmen Nasional
7	Dinas Pendidikan	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Pelatihan Proktor dan Teknisi Asesmen Nasional
8	Dinas Pendidikan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Pelatihan
9	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Bimtek Tim Internal
10	Kecamatan Wringinanom	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diWilayah Kecamatan	Pelatihan Kopwan

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
11	Kecamatan Wringinanom	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelatihan Ketrampilan Ekonomi Produktif
12	Kecamatan Wringinanom	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pelatihan Ketertiban dan Ketentraman

G. ASB-007 PELATIHAN PEGAWAI TANPA PRAKTIK LAPANGAN DI DALAM KANTOR – PENUH WAKTU

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kemampuan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam suatu bidang tertentu tanpa memberikan praktik lapangan. Aktivitas ini diselenggarakan di lingkungan kantor Kabupaten Gresik dengan durasi pelaksanaan lebih dari 4 jam.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp64.893,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

= Rp64.893,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan

Tabel 007. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Pagu (Rp)
1	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10,13%	Rp6.572
2	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	62,91%	Rp40.827
3	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26,96%	Rp17.495
			100,00%	Rp64.893
4	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia*		

*Dianggarkan sesuai dengan kualifikasi Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia.

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia; dan
2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	170 peserta	20 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	6 hari/kali	1 hari/kali

Contoh Aktivitas ASB 007:

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
1	Badan Kepegawaian Daerah	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Bimtek Purna Tugas

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
2	Dinas Kesehatan	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Pelatihan Tenaga di Call Center dalam rangka Penguatan Kegiatan Public Safety Center
3	Dinas Pendidikan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pelatihan/Pembinaan KKG
4	Dinas Pendidikan	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Pelatihan/Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Program Kesetaraan
5	Dinas Pendidikan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pelatihan/Pembinaan PTK
6	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Bimtek Layanan Informasi Arsip

H. ASB-008 PELATIHAN PEGAWAI TANPA PRAKTIK LAPANGAN DI LUAR KANTOR – PENUH WAKTU

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kemampuan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam suatu bidang tertentu tanpa memberikan praktik lapangan. Aktivitas ini diselenggarakan di luar lingkungan kantor Kabupaten Gresik tanpa memberikan fasilitas menginap dengan durasi pelaksanaan lebih dari 4 jam.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp203.545,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

= Rp203.545,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan

Tabel 008. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Pagu (Rp)
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5,68%	11.563
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	44,07%	89.711
3	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30,50%	62.088
4	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	19,74%	40.183
			100,00%	203.545
5	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia*		

*Dianggarkan sesuai dengan kualifikasi Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia.

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia. Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	200 peserta	100 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	3 hari/kali	3 hari/kali

Contoh Aktivitas ASB 008:

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
1	Dinas Pendidikan	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Pelatihan Pegawai
2	Dinas Pendidikan	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Pelatihan Pegawai

I. ASB-009 PELATIHAN PEGAWAI TANPA PRAKTIK LAPANGAN DI LUAR DAERAH – PENUH WAKTU

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kemampuan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam suatu bidang tertentu tanpa memberikan praktik lapangan. Aktivitas ini diselenggarakan di luar Daerah Kabupaten Gresik dengan memberikan fasilitas menginap dengan durasi pelaksanaan lebih dari 4 jam.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp1.243.334,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

$$= \text{Rp}1.243.334,00 \times \text{jumlah peserta} \times \text{jumlah hari pelaksanaan}$$

Tabel 009. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Pagu (Rp)
1	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,73%	9.117
2	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,26%	15.699
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,24%	15.456
4	5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kanto-Suvenir/Cendera Mata	0,14%	1.725
5	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	8,77%	109.032
6	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28,60%	355.591
7	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (<i>Fullboard</i>)	59,25%	736.713
			100,00%	1.243.334
8	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia*		

*Dianggarkan sesuai dengan kualifikasi Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia.

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia. Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	71 peserta	40 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	3 hari/kali	1 hari/kali

Contoh Aktivitas ASB 009:

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
1	Sekretariat Daerah_Bagian Layanan Pengadaan	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Bimbingan Teknik/ Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Bimbingan teknis tentang tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Bimtek luar daerah

J. ASB-010 PELATIHAN NON-PEGAWAI TANPA PRAKTIK LAPANGAN DI DALAM KANTOR – PARUH WAKTU

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kemampuan Masyarakat Umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam suatu bidang tertentu tanpa memberikan praktik lapangan. Aktivitas ini diselenggarakan di lingkungan kantor Kabupaten Gresik dengan durasi pelaksanaan maksimal 4 jam.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp80.377,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

= (Rp80.377,00 x jumlah peserta keseluruhan x jumlah hari pelaksanaan) + (Rp110.000,00 x jumlah peserta masyarakat x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 010. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Pagu (Rp)
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	17,67%	14.205
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9,10%	7.317
3	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37,32%	30.000
4	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	35,90%	28.856
			100%	80.377
5	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia*		
6	5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat**		Rp110.000

* Dianggarkan sesuai dengan kualifikasi Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia.

**Dianggarkan sesuai dengan jumlah masyarakat yang diundang.

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia;
2. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat; dan
3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	330 peserta	21 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	13 hari/kali	1 hari/kali

Contoh Aktivitas ASB 010:

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
1	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Bimtek PPRG Desa
2	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Bimtek Pemantapan PPRG bagi OPD
3	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Bimtek BK APBD 2021

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
4	Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perindag	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Bimtek Tata Cara Pelaksanaan Rapat Anggota
5	Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perindag	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Pelatihan/Peningkatan Penerapan Akuntabilitas Organisasi dan manajemen bagi pengurus koperasi
6	Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perindag	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Bimtek Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas
7	Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perindag	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Pelatihan Kompetensi Pengendali Internal Koperasi
8	Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perindag	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Pelatihan/Penguatan Organisasi dan Tata laksana Koperasi
9	Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perindag	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan	Pelatihan Pengelolaan Usaha Berbasis Syari'a

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
		Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
10	Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perindag	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelatihan Peningkatan Akses Pemasaran dengan Forum Kerjasama Antar Koperasi
11	Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perindag	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelatihan Peningkatan Aspek Legal dan Perlindungan Hukum Bagi Koperasi
12	Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perindag	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelatihan Akses Pemasaran dan Permodalan Bagi Koperasi/UM

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
13	Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perindag	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Usaha Bagi Koperasi/UM
14	Dinas Lingkungan Hidup	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Pelatihan
15	Kecamatan Bungah	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Pelatihan/Pembinaan pengelolaan dana ADD
16	Kecamatan Cerme	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pelatihan
17	Kecamatan Cerme	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
18	Kecamatan Cerme	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Pelatihan/Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
19	Kecamatan Gresik	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelatihan dan Pembinaan Manajemen Lembaga Desa
20	Kecamatan Gresik	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI	Pelatihan/Pembinaan Linmas
21	Kecamatan Gresik	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelatihan Perempuan Pedesaan
22	Kecamatan Panceng	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelatihan Dan Pembinaan Manajemen Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes) Pasar Desa, Lembaga
23	Kecamatan Panceng	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelatihan Dan Pembinaan Peningkatan Ekonomi Keluarga
24	Kecamatan Panceng	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelatihan/Pembinaan UPKU/BUMDesa
25	Kecamatan Ujungpangkah	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pelatihan Peningkatan Peran Serta Dan Peningkatan Kesetaraan Gender
26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Pelatihan

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
27	Dinas Sosial	Peningkatan Kemampuan Pekerja Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Potensi Sosial	Pelatihan dasar psm
28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Bimtek SISKEUDES
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penguatan Kawasan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kapasitas untuk dan	Pelatihan
30	Dinas Kesehatan	Penyiapan dan Pelayanan Rujukan Perumusan Pelaksanaan Kesehatan	Pelatihan Bantuan Hidup Dasar Mendukung Kegiatan PSC
31	Dinas Perikanan	Pengawasan Perikanan Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota Usaha Bidang	Bimbingan Teknis
32	Dinas Perikanan	Pengawasan Perikanan Tangkap di Wilayah Danau, Waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota Usaha	Bimbingan teknis
33	Dinas Perikanan	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Pelatihan

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
34	Kecamatan Gresik	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Pelatihan SDM Desa
35	Kecamatan Sidayu	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelatihan Administrasi KOPWAN
36	Dinas Perikanan	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan tangkap	Pelatihan Alat tangkap ikan ramah lingkungan
37	Dinas Pertanian	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Bimtek Tanaman Tebu (Demplot)
38	Dinas Pertanian	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pelatihan Pengolahan Pasca Panen Tanaman Tembakau
39	Dinas Pertanian	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pelatihan Peningkatan Mutu Tanaman Perkebunan (Tebu)
40	Dinas Perikanan	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Pelatihan Pembuatan Kemasan Produk

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
41	Dinas Perikanan	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Pelatihan Teknologi Penanganan Produk Ikan Segar
42	Kecamatan Duduksampeyan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten
44	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelatihan Wirausaha
45	Kecamatan Kebomas	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

K. ASB-011 PELATIHAN NON-PEGAWAI TANPA PRAKTIK LAPANGAN DI DALAM KANTOR – PENUH WAKTU

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kemampuan Masyarakat Umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam suatu bidang tertentu tanpa memberikan praktik lapangan. Aktivitas ini diselenggarakan di lingkungan kantor Kabupaten Gresik dengan durasi pelaksanaan lebih dari 4 jam.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp170.881,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

= (Rp170.881,00 x jumlah peserta keseluruhan x jumlah hari pelaksanaan) + (Rp110.000,00 x jumlah peserta masyarakat x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 011. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Pagu (Rp)
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9,66%	16.515
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	13,38%	22.857
3	5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	23,19%	39.634
4	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37,75%	64.510
5	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16,01%	27.365
			100%	170.881

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Pagu (Rp)
6	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia*		
7	5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat**		110.000

* Dianggarkan sesuai dengan kualifikasi Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia.

**Dianggarkan sesuai dengan jumlah masyarakat yang diundang.

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia;
2. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat;
3. Belanja Jasa Jalan/Tol;
4. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan; dan
5. Belanja Sewa Mebel.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	150 peserta	40 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	5 hari/kali	1 hari/kali

Contoh Aktivitas ASB 011:

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Bimtek Panitia Desa

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Bimtek
3	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Pelatihan
4	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Bintek II s/d VI
5	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Muda Pelopor	Pelatihan Wirausaha
6	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Bimtek Arsip Desa
7	Kecamatan Sidayu	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelatihan Ekonomi Produktif
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Pelatihan
9	Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perindag	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Pelatihan ekspor

L. ASB-012 PELATIHAN NON-PEGAWAI DENGAN PRAKTIK LAPANGAN
DI DALAM KANTOR – PARUH WAKTU

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kemampuan Masyarakat Umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam suatu bidang tertentu dengan memberikan praktik lapangan. Aktivitas ini diselenggarakan di lingkungan kantor Kabupaten Gresik dengan durasi pelaksanaan maksimal 4 jam.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp174.738,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

= (Rp174.738,00 x jumlah peserta keseluruhan x jumlah hari pelaksanaan) + (Rp110.000,00 x jumlah peserta masyarakat x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 012. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Pagu (Rp)
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	18,05%	31.535
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5,19%	9.063
3	5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	42,24%	73.818
4	5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	9,72%	16.980

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Pagu (Rp)
5	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	17,17%	30.000
6	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,64%	13.342
			100%	174.738
7	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia*		
8	5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat**		110.000

* Dianggarkan sesuai dengan kualifikasi Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia.

**Dianggarkan sesuai dengan jumlah masyarakat yang diundang.

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia;
2. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat;
3. Belanja Obat-Obatan Lainnya; dan
4. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	43 peserta	40 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	5 hari/kali	4 hari/kali

Contoh Aktivitas ASB 012:

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Pelatihan Praktek
2	Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perindag	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelatihan Keterampilan Dengan Dasar Menjahit Bagi Koperasi/UM (Praktek)
3	Dinas Perikanan	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Pelatihan/Pembinaan Nelayan dengan praktek lapangan
4	Dinas Perikanan	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Bimbingan Teknis
5	Dinas Perikanan	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Pelatihan diversifikasi olahan hasil perikanan

M. ASB-013 PELATIHAN NON-PEGAWAI TANPA PRAKTIK LAPANGAN DI LUAR KANTOR – PENUH WAKTU

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kemampuan Masyarakat Umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam suatu bidang tertentu tanpa memberikan praktik lapangan. Aktivitas ini diselenggarakan di luar lingkungan kantor Kabupaten Gresik tanpa memberikan fasilitas menginap dengan durasi pelaksanaan lebih dari 4 jam.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp521.784,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

= (Rp521.784,00 x jumlah peserta keseluruhan x jumlah hari pelaksanaan) + (Rp110.000,00 x jumlah peserta masyarakat x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 013. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Pagu (Rp)
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,58%	8.863
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3,48%	19.540
3	5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	26,27%	147.700

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Pagu (Rp)
4	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6,49%	36.463
5	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	15,00%	84.321
6	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2,22%	12.482
7	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	12,90%	72.519
8	5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1,55%	8.723
9	5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>)	3,06%	17.194
10	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20,28%	113.981
			100,00%	521.784
11	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia*		
12	5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat**		110.000

* Dianggarkan sesuai dengan kualifikasi Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia.

**Dianggarkan sesuai dengan jumlah masyarakat yang diundang.

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia;
2. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat;
3. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas;
4. Belanja Bahan-Bahan Lainnya;
5. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor;

6. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya;
7. Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat ;
8. Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan;
9. Belanja Jasa Jalan/Tol; dan
10. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	100 peserta	40 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	3 hari/kali	1 hari/kali

Contoh Aktivitas ASB 013:

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Bintek I dengan Petugas Register Desa/Kelurahan
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Bintek III/Pelatihan Petugas Kependudukan (Dinas s/d Desa)
3	Dinas Perhubungan	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Angkutan Orang

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
4	Dinas Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Bimbingan Teknis Program Kampung Iklim
5	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pelatihan Masyarakat
6	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota

N. ASB- 014 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan. Aktivitas ini dimulai dari persiapan sampai diserahkan laporan dokumen perencanaan perangkat daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah sub kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp435.585,00 per sub kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

= (Rp435.585,00 x jumlah sub kegiatan) + (Rp110.000,00 x jumlah peserta masyarakat x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 014. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Pagu (Rp)
1	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	29,14%	126.947
2	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27,81%	121.124
3	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	10,74%	46.791
4	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32,31%	140.721
			100,00%	435.585
5	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia*		
6	5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat**		110.000

*Dianggarkan sesuai dengan jumlah masyarakat yang diundang.

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia;
2. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat;
3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor;
4. Belanja Lembur; dan
5. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah sub kegiatan	68	15

Contoh Aktivitas ASB 014:

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
1	Dinas Pertanahan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3	Dinas Sosial	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4	Dinas Pertanian	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
6	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
8	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
9	Kecamatan Manyar	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
10	Kecamatan Ujungpangkah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
11	Kecamatan Duduksampeyan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
12	Kecamatan Balongpanggang	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
13	Kecamatan Driyorejo	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
14	Dinas Pendidikan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
15	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindag	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
17	Dinas Lingkungan Hidup	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
19	Kecamatan Gresik	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
20	Kecamatan Bungah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
21	Kecamatan Panceng	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
22	Kecamatan Cerme	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
23	Kecamatan Menganti	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
24	Kecamatan Wringinanom	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
26	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
27	Dinas Tenaga Kerja	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
28	Satuan Polisi Pamong Praja	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
29	Dinas Kesehatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
30	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
31	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
32	Dinas Perhubungan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
33	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
34	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
35	Sekretariat Dewan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
36	Kecamatan Kebomas	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
37	Kecamatan Sidayu	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
38	Kecamatan Dukun	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
39	Kecamatan Benjeng	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
40	Kecamatan Kedamean	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
41	Kecamatan Sangkapura	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
42	Dinas Perikanan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
43	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
44	Inspektorat	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
45	Sekretariat Daerah Bagian Program Pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
46	Badan Kepegawaian Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

O. ASB- 015 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja satuan kerja perangkat daerah yang dimulai dari persiapan hingga diteruskannya hasil penyusunan buku tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah sub kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp241.369,00 per sub kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

= Rp241.369,00 x jumlah sub kegiatan

Tabel 015. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Pagu (Rp)
1	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	26,38%	63.669
2	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31,09%	75.031
3	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	15,02%	36.263
4	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	27,51%	66.406
			100,00%	237.868

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Belanja Lembur; dan
2. Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah sub kegiatan	60	16

Contoh Aktivitas ASB 015:

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
1	Dinas Sosial	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2	Dinas Pertanian	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
8	Kecamatan Manyar	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
9	Kecamatan Ujungpangkah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10	Kecamatan Duduksampeyan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
11	Kecamatan Balongpanggang	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
13	Kecamatan Gresik	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
14	Kecamatan Driyorejo	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
15	Kecamatan Bungah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
16	Kecamatan Panceng	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
17	Kecamatan Cerme	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
18	Kecamatan Menganti	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
19	Dinas Pendidikan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
22	Dinas Kesehatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
23	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
24	Dinas Komunikasi dan Informatika	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
26	Sekretariat Dewan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
27	Kecamatan Kebomas	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
28	Kecamatan Sidayu	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
29	Kecamatan Dukun	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
30	Kecamatan Benjeng	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
31	Kecamatan Kedamean	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
32	Kecamatan Sangkapura	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
33	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
34	Inspektorat	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
35	Dinas Lingkungan Hidup	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
36	Dinas Tenaga Kerja	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
37	Kecamatan Wringinanom	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
38	Sekretariat Daerah Bagian Program Pembangunan	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja SKPD se Kabupaten Gresik
39	Kecamatan Tambak	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD	Koordinasi Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

P. ASB- 016 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun laporan keuangan akhir tahun satuan kerja perangkat daerah yang dimulai dari persiapan hingga diserahkan hasil penyusunan buku tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah sub kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp143.329,00 per sub kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

$$= \text{Rp}143.329,00 \times \text{jumlah sub kegiatan}$$

Tabel 016. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Pagu (Rp)
1	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	32,87%	47.108
2	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26,60%	38.132
3	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	16,17%	23.180
4	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24,36%	34.909
			100,00%	143.329

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor;
2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover;
3. Belanja Lembur; dan
4. Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah sub kegiatan	68	16

Contoh Aktivitas ASB 016:

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
1	Badan Kepegawaian Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun BKD

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
2	Sekretariat Daerah Bagian Keuangan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3	Dinas Pertanian	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4	Kecamatan Manyar	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5	Kecamatan Duduksampeyan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6	Kecamatan Balongpanggung	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
7	Kecamatan Driyorejo	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
8	Dinas Tenaga Kerja	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
9	Kecamatan Gresik	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
10	Kecamatan Panceng	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
11	Kecamatan Cerme	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
12	Sekretariat Dewan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
14	Kecamatan Dukun	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
15	Kecamatan Kebomas	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
16	Kecamatan Kedamean	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
17	Kecamatan Tambak	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Q. ASB-017 PENYELENGGARAAN MUSRENBANG TINGKAT
KECAMATAN

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam merumuskan program/kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah pada tingkat kecamatan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp87.258,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

= (Rp87.258,00 x jumlah peserta keseluruhan x jumlah hari pelaksanaan) + (Rp110.000,00 x jumlah peserta masyarakat x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 017. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Pagu (Rp)
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	17,04%	14.868
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	8,73%	7.619
3	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	47,80%	41.706
4	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1,76%	1.532
5	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24,68%	21.532
			100%	87.258
6	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia*		

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Pagu (Rp)
7	5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat**		110.000

* Dianggarkan sesuai dengan kualifikasi Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia.

**Dianggarkan sesuai dengan jumlah masyarakat yang diundang.

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia; dan
2. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	185 peserta	65 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	2 hari/kali	1 hari/kali

Contoh Kegiatan ASB-017:

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
1	Kecamatan Manyar	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah Perencanaan Pembangunan
2	Kecamatan Ujungpangkah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah Perencanaan Pembangunan

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
3	Kecamatan Duduksampeyan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah Perencanaan Pembangunan
4	Kecamatan Balongpanggung	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah Perencanaan Pembangunan
5	Kecamatan Driyorejo	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah Perencanaan Pembangunan
6	Kecamatan Tambak	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah Perencanaan Pembangunan
7	Kecamatan Kebomas	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah Perencanaan Pembangunan
8	Kecamatan Sidayu	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah Perencanaan Pembangunan

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
9	Kecamatan Dukun	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah Perencanaan Pembangunan
10	Kecamatan Benjeng	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah Perencanaan Pembangunan
11	Kecamatan Kedamean	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah Perencanaan Pembangunan
12	Kecamatan Sangkapura	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah Perencanaan Pembangunan
13	Kecamatan Panceng	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah Perencanaan Pembangunan
14	Kecamatan Cerme	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah Perencanaan Pembangunan

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
15	Kecamatan Menganti	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah Perencanaan Pembangunan
16	Kecamatan Wringinanom	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah Perencanaan Pembangunan
17	Kecamatan Gresik	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah Perencanaan Pembangunan
18	Kecamatan Bungah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah Perencanaan Pembangunan

R. ASB 018 ADMINISTRASI KAJIAN/PENELITIAN PIHAK KETIGA

Deskripsi:

Aktivitas ini adalah aktivitas yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk menyusun kajian/penelitian dengan menggunakan jasa pihak ketiga.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai kajian (X)

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

0,1463	Untuk nilai kajian	Rp1 – Rp50.000.000
0,0999	Untuk nilai kajian	Rp50.000.001 – Rp100.000.000
0,0727	Untuk nilai kajian	di atas Rp100.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Kajian/Penelitian Pihak Ketiga:

No.	Nilai Kajian/Penelitian Pihak Ketiga (X)	Pagu Belanja Administrasi (Y)
1	1 < X ≤ 50.000.000	Y = 0,1463 X
2	50.000.000 < X ≤ 100.000.000	Y = 0,0999 X
3	100.000.000 < X	Y = 0,0727 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 018 berikut.

Tabel 018. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Pagu (Rp)
1	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	21,51%	*1.563.777
2	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	64,62%	*4.697.874

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Pagu (Rp)
3	5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	13,87%	*1.008.349
			100,00%	7.270.000

*Jika Pagu Belanja Administrasi dengan X sebesar Rp100.000.000.

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Belanja Perjalanan Dinas Biasa
2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
3. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Contoh Kegiatan ASB 018:

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
1	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kajian
2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pengembangan Cagar Budaya	Kajian
3	Dinas Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kajian
4	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kajian Alur Pelayaran Sangkapura - Pulau Gili - Noko
5	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa	Kajian konsultansi

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
6	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	kajian konsultasi
7	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kajian Konsultasi non konstruksi
8	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Kajian Pihak Ketiga
9	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kajian/Analisa Perubahan Ekonomi Sektoral Dampak Pandemi <i>Covid-19</i> dan Strategi Percepatan Pemulihan Ekonomi
10	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kajian/ <i>Master Plan Smart City</i> Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2025
11	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kajian/Pembuatan Aplikasi <i>Back To School</i>
12	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kajian/Penyusunan Dokumen Pemetaan dan Strategi Penanganan PMKS di Kabupaten Gresik

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
13	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kajian/Penyusunan Inflasi Daerah Kabupaten Gresik
14	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kajian/Penyusunan Infografis Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah
15	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kajian/Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Proyek Strategis Nasional berdasar Perpres 80 Tahun 2019 di Kabupaten Gresik
16	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kajian/Penyusunan Naskah Akademik, Ranperda, Dokumen, dan Hasil Fasilitasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025
17	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kajian/Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2025

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
18	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kajian/Prospek dan Peluang Investasi Industri di Kabupaten Gresik
19	Dinas Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kajian/Studi Penelitian dan Bantuan Teknik
20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kajian/ <i>Survalance</i> ISO 9001 : 2015
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kajian/ <i>Survey</i> Kepuasan Masyarakat (SKM)
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Penyusunan Masterplan Air Limbah Domestik (Lanjutan) di Pulau Bawean Kabupaten Gresik
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Naskah Akademik/Rancangan peraturan Penanggulangan Bencana
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
25	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem drainase perkotaan	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem drainase perkotaan
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Penyusunan SID <i>shor tcut/sudetan</i> Kali Lamong
27	Inspektorat	Perumusan Kebijakan teknis di bidang fasiliasi pengawasan	Perumusan Kebijakan teknis di bidang fasiliasi pengawasan
28	Inspektorat	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
29	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan IPLT dan TPS
30	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik

S. ASB 019 ADMINISTRASI MENGIKUTI PAMERAN

Deskripsi:

Aktivitas ini adalah administrasi dari aktivitas keikutsertaan serta partisipasi organisasi perangkat daerah dalam sebuah pameran kepada masyarakat.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai Sewa Stand + Belanja Dekorasi (X)

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

1,1229	Untuk Nilai Sewa Stand + Belanja Dekorasi	Rp1 – Rp10.000.000
0,7472	Untuk Nilai Sewa Stand + Belanja Dekorasi	Rp10.000.001 – Rp20.000.000
0,5590	Untuk Nilai Sewa Stand + Belanja Dekorasi	Rp20.000.001 – Rp30.000.000
0,4380	Untuk Nilai Sewa Stand + Belanja Dekorasi	Rp30.000.001 – Rp40.000.000
0,3506	Untuk Nilai Sewa Stand + Belanja Dekorasi	> Rp40.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Mengikuti Pameran:

No.	Nilai Sewa Stand + Belanja Dekorasi (X)			Pagu Belanja Administrasi (Y)
1	1	< X ≤	10.000.000	Y = 1,1229 X + (Rp110.000,00 x jumlah masyarakat)
2	10.000.000	< X ≤	20.000.000	Y = 0,7472 X + (Rp110.000,00 x jumlah masyarakat)
3	20.000.000	< X ≤	30.000.000	Y = 0,5590 X + (Rp110.000,00 x jumlah masyarakat)
4	30.000.000	< X ≤	40.000.000	Y = 0,4380 X + (Rp110.000,00 x jumlah masyarakat)
5	40.000.000	< X		Y = 0,3506 X + (Rp110.000,00 x jumlah masyarakat)

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 019 berikut.

Tabel 019. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Pagu (Rp)
1	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	37,83%	*13.264.166
2	5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	27,21%	* 9.539.049
3	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34,96%	*12.256.785
			100,00%	35.060.000
4	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**		
5	5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat***		110.000

*Jika Pagu Belanja Administrasi dengan X sebesar Rp100.000.000.

** Dianggarkan sesuai dengan kualifikasi Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia.

***Dianggarkan sesuai dengan jumlah masyarakat yang diundang.

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Belanja Perjalanan Dinas Biasa; dan
2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Contoh Kegiatan ASB 019:

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
1	Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perindag	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan	Pameran

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknolog	
2	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Pameran Hasil karya kegiatan Geliat Perpusdes
3	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Pameran investasi

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI